

KONSEP PERENCANAAN PENDANAAN SATUAN PENDIDIKAN

Ahmad Syayyiquil Amni Munir¹, Abd Hamid², Bayu Wira Wardani³, Mardiyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: ahmadsyayyiquil321@gmail.com¹, abdhamed43@gmail.com²,
bayuwardani92@gmail.com³

Abstrak: Pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan merupakan ujung tombak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam lingkungan persaingan nasional yang semakin ketat saat ini. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang secara aktif mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan intelektual, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembiayaan adalah dana yang disediakan oleh suatu pihak untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan oleh dirinya sendiri atau suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini tidak dilakukan secara langsung akan tetapi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari sebuah buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan tertentu. RAPBS menunjukkan bagaimana pendapatan untuk menjalankan sekolah direncanakan dan bagaimana biaya akan dibelanjakan. Penggunaan biaya ini menunjukkan pola pendanaan dalam pendidikan.

Kata Kunci: Satuan Pendidikan, Pendanaan, Biaya

Abstract: Education is one of the keys to the progress of the nation and state. Education is the spearhead for improving the quality of human resources so they are able to compete in today's increasingly tight national competitive environment. The National Education System Law of 2003 states that education is a conscious and planned effort to create a learning environment and learning process that actively develops the potential of students so that they have religious spiritual strength, self-control, noble character, intellectual intelligence, and the skills needed by themselves, society, the nation and the state. Financing is funds provided by a party to support an investment planned by itself or an institution. In other words, financing is funds issued to support planned investments to achieve predetermined goals. The type of research used by the author is a qualitative

method with library research. This research was not carried out directly but was carried out by collecting data sourced from books, journals, books, articles and certain writings. The RAPBS shows how the income for running the school is planned and how costs will be spent. The use of these costs shows funding patterns in education.

Keywords: Education Units, Funding, Costs.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan merupakan ujung tombak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam lingkungan persaingan nasional yang semakin ketat saat ini. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan kunci terpenting menuju masa depan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan yang layak dan berkualitas, Indonesia akan semakin tertinggal dari negara lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara-negara dengan penduduk yang berpendidikan tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang secara aktif mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan intelektual, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan berfungsi bagi masyarakat untuk memperkaya kehidupan ekonomi, politik, dan budayanya. Pendidikan memperkuat kemampuan kita untuk memanfaatkan teknologi demi kemajuan sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam memajukan pendidikan adalah pendanaan pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik pada tataran makro (nasional) maupun mikro (lembaga pendidikan), persoalan pendanaan dianggap penting. Pembiayaan merupakan faktor yang harus selalu tersedia. Misalnya, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan (APBN) tahunan paling sedikit 20% dari total anggaran nasional, dan pemerintah daerah juga menetapkan anggaran pendidikan tahunan, misalnya untuk gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya di wilayahnya.

Sebagai bagian dari suatu lembaga atau organisasi, sekolah menyiapkan Anggaran Tahunan Sekolah (RAPBS). RAPBS menunjukkan bagaimana pendapatan untuk menjalankan sekolah direncanakan dan bagaimana biaya akan dibelanjakan. Penggunaan biaya ini menunjukkan pola pendanaan dalam pendidikan. Oleh karena itu, pendanaan pada semua jenjang penyampaian pendidikan merupakan faktor krusial untuk menjamin penyampaiannya. Tanpa adanya biaya pendidikan tidak akan berjalan.

Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran yang semakin penting dalam pendanaan satuan pendidikan. Setiap daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan dapat berbentuk sumbangan pendidikan, bantuan beasiswa, atau dukungan material lainnya. Kontribusi masyarakat ini menjadi pelengkap penting bagi pendanaan dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Pengelolaan pendanaan satuan pendidikan juga harus memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka.

Standardisasi biaya pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan pendanaan satuan pendidikan. Standar ini membantu dalam perencanaan anggaran dan memastikan kewajaran dalam penggunaan dana pendidikan. Keberlanjutan pendanaan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Strategi pendanaan jangka panjang perlu dikembangkan untuk memastikan keberlangsungan program-program pendidikan.

Pada akhirnya, pendanaan satuan pendidikan merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Keberhasilan dalam mengelola pendanaan pendidikan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing bangsa di era global.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini tidak dilakukan secara langsung akan tetapi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari sebuah buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan tertentu.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah "analisis isi" atau "content analysis." Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis pendapat atau teks untuk mengidentifikasi pola atau informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dan hasil dari kajian literatur ini akan menunjukkan bagaimana pandangan tentang manajemen, Pendidikan, administrasi, serta isu dan Solusi dari permasalahan pendidikan. Berbagai langkah dalam penelitian ini adalah:

- 1) menentukan gambaran umum tentang topik penelitian
- 2) menganalisis informasi yang mendukung tema
- 3) menyoroti fokus penelitian
- 4) mengklasifikasikan lebih lanjut analisis dan bacaan penelitian
- 5) Membaca dan menulis catatan penelitian
- 6) Review untuk menyempurnakan bahan bacaan
- 7) Kategorikan bahan bacaan dan mulai menulis laporan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian

Manajemen pembiayaan adalah proses mengoptimalkan sumber daya keuangan yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana untuk mendukung proses pembelajaran, menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen keuangan pendidikan adalah pada bagaimana mengelola sumber daya keuangan yang ada secara profesional untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Istilah “keuangan” atau “pendanaan”, berasal dari kata bahasa Inggris “finance”, berkaitan dengan upaya untuk mengumpulkan atau menghimpun modal guna mendanai

kegiatan yang dilakukan. Akan tetapi, akhir-akhir ini, definisi keuangan dan modal telah diperluas sehingga mencakup tidak hanya upaya untuk mengumpulkan modal tetapi juga penggunaan modal tersebut. Perluasan pemahaman ini berasal dari pengakuan bahwa modal merupakan faktor produksi yang langka dan karenanya harus digunakan sebaik mungkin. Pendanaan pendidikan menurut Standar Nasional Pendidikan. PP RI No.19/2005 terdiri dari tiga bagian utama:

1. Biaya investasi meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan biaya modal kerja tetap.
2. Biaya operasional merupakan biaya pelatihan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan secara teratur dan berkesinambungan.
3. Biaya personal meliputi:
 - Gaji dan semua tunjangan pendidik.
 - Bahan atau peralatan sekali pakai pendidik.
 - Biaya operasional tidak langsung pada sektor pendidikan meliputi listrik, air, jasa komunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, biaya transportasi, biaya konsumsi, dan lain-lain.

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang harus ada, dan tidak dapat dipahami tanpa mengetahui konsep-konsep yang mendasarinya. Persoalan biaya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi pendidikan dan masyarakat.¹

Menurut Supriyadi (2003), belanja pendidikan merupakan salah satu faktor instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian integral dari operasi keuangan. Secara umum, manajemen keuangan mengacu pada pengendalian fungsi keuangan seperti perencanaan, penganggaran, administrasi, pengambilan, penyimpanan, pengendalian dan audit keuangan. Manajemen keuangan di tingkat sekolah pada hakikatnya sama dengan manajemen keuangan secara umum. Kementerian Pendidikan Nasional (2011) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai kegiatan

¹ Sudarmono, Hasibuan, and Anwar Us, "Pembiayaan Pendidikan."

pengelolaan/penataan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan kata lain, manajemen keuangan sekolah mencakup berbagai kegiatan untuk mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, akuntansi, pengeluaran, pengawasan dan keuangan sekolah.

Pengelolaan keuangan sekolah secara profesional akan memungkinkan tumbuhnya satuan pendidikan secara optimal dan pada akhirnya menunjang mutu kegiatan belajar mengajar. Karena sekolah bukanlah lembaga yang mencari keuntungan, semua pendapatan sekolah harus digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan.

2. Landasan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ke-4) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Setiap warga negara diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban untuk mendanainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk mendidik rakyat agar beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Negara mengutamakan anggaran pendidikan paling sedikit 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Ditetapkan secara tegas bahwa dana pendidikan yang dialokasikan untuk gaji guru atau biaya pendidikan kedinasan paling sedikit 20% dari APBN dan paling sedikit 20% dari APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Gaji guru dan dosen yang diangkat pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Dana untuk penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, pemerintah daerah, pemerintah nasional dan daerah, serta sumber lain. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003: Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

- b. Pasal 12 ayat 1 Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak memperoleh beasiswa karena berprestasi dalam bidang akademik dan berhak memperoleh penggantian biaya pendidikan apabila orang tua tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap mahasiswa bertanggung jawab untuk menanggung biaya penyelesaian pelatihannya, kecuali mahasiswa yang dikecualikan dari kewajiban ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bab VIII Pendidikan Wajib Pasal 34 Setiap warga negara yang telah berusia enam tahun dapat mengikuti program pendidikan wajib. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan gratis dan wajib sekurang-kurangnya pada jenjang dasar. Pendidikan wajib merupakan tanggung jawab nasional dan dikelola oleh pemerintah, otoritas pendidikan daerah dan kota. Sekurang-kurangnya 20% APBN dan 20% APBD pada sektor pendidikan dialokasikan untuk pendidikan, di samping gaji guru dan biaya pelatihan pegawai negeri sipil. Gaji guru dan dosen yang diangkat pemerintah dibagi dalam APBN dan APBD.

3. Jenis Pembiayaan Pendidikan

Pada dasarnya, ada beberapa jenis pendanaan pendidikan:

Biaya Langsung Menurut Anwar (1991), biaya langsung didefinisikan sebagai pengeluaran yang secara langsung mendanai penyediaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga mencakup biaya yang secara langsung memengaruhi aspek atau proses pendidikan. Misalnya, gaji guru dan biaya penyediaan ruang belajar mengajar. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran kepada peserta didik meliputi pembelian bahan ajar, sarana belajar, transportasi, gaji guru, dan lain-lain, dan ditanggung oleh pemerintah, orang tua, dan peserta didik sendiri.

Biaya langsung meliputi jenis biaya sebagai berikut:

Biaya rutin (recurrent cost) adalah biaya yang mendanai kegiatan operasional Pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan, membayar gaji guru dan staf sekolah, menyelenggarakan pelayanan administrasi, dan memelihara sarana dan prasarana.

Untuk penjelasan lebih rinci, Hallak (1985) menguraikan beberapa komponen pendanaan pendidikan.

Faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Peningkatan aktivitas belajar mengajar
- b. Peningkatan perkembangan aktivitas siswa
- c. Pelatihan guru
- d. Anggaran sekolah
- e. Pengadaan bahan pembelajaran
- f. Dll.

Biaya tidak langsung adalah biaya yang secara umum mencakup hal-hal seperti hilangnya pendapatan siswa dari pendidikan (earning foregone by student), kebebasan dari kewajiban pajak karena sekolah tersebut nirlaba (biaya bebas pajak), bebas dari biaya sewa fasilitas sekolah yang tidak digunakan secara langsung untuk pengajaran, dan penyusutan sebagai indikasi penggunaan fasilitas sekolah yang telah digunakan dalam jangka waktu lama.

Biaya tidak langsung mencakup jenis biaya berikut:

- a) Biaya pribadi adalah biaya, termasuk biaya peluang, yang ditanggung keluarga dalam membiayai pendidikan anak mereka. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayarkan oleh keluarga atau individu.
- b) Biaya sosial adalah biaya (termasuk biaya pribadi) yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendanai sekolah. Dengan kata lain, biaya komunitas adalah biaya kuliah yang dibayarkan oleh komunitas.

4. Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Beberapa prinsip tertentu yang harus dipatuhi ketika mengelola keuangan sekolah. Pasal 48 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 mengatur bahwa pengelolaan sumber daya pendidikan harus didasarkan pada asas keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pertama, Efisiensi berkaitan dengan jumlah aktivitas. Efisiensi sering kali digambarkan sebagai rasio optimal antara masukan dan keluaran. Kinerja yang dipertaruhkan melibatkan energi, pikiran, waktu dan uang.

Kedua, Keadilan dalam pengelolaan keuangan berarti adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari pelayanan publik yang bermutu. Prinsip ini penting bagi organisasi yang menyediakan layanan publik seperti pendidikan. Sebab, fokus layanannya adalah menjamin kesempatan yang sama bagi masyarakat umum dalam mengakses layanan pendidikan. Manajemen keuangan membantu mencapai kesempatan yang sama.

Ketiga, Transparansi yang berarti keterbukaan. Transparansi manajemen berarti mengungkapkan pengelolaan keuangan sekolah. Dalam lembaga pendidikan, pengelolaan keuangan yang transparan berarti kebijakan keuangan yang dipublikasikan, sumber dan jumlah dana yang dipublikasikan, penggunaan dan akuntabilitas publik, sehingga memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengetahui informasinya. Transparansi keuangan sangat penting untuk meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan apa pun di sekolah. Lebih jauh lagi, transparansi menginformasikan dan memfasilitasi perolehan informasi yang akurat dan relevan, yang dapat membangun kepercayaan bersama antara pemerintah, masyarakat, orang tua dan warga sekolah.

Keempat, Akuntabilitas atau evaluasi oleh orang lain berdasarkan kualitas kinerja seseorang dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawab. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sekolah akan mengelola dana secara bertanggung jawab, berdasarkan perencanaan yang matang dan peraturan yang berlaku.

5. Sumber Pendanaan Pendidikan

Terkait dengan biaya pendidikan, ada beberapa sumber yang dapat dikaitkan dengan pembiayaan pendidikan, antara lain biaya yang ditanggung Pemerintah Pusat dan Daerah, biaya yang ditanggung masyarakat setempat, orang tua/wali peserta didik, biaya yang ditanggung masyarakat setempat selain orang tua/wali peserta didik, dan biaya yang ditanggung lembaga pendidikan itu sendiri.

Dana pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kami telah menekankan pendanaan pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan didanai oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah telah memberlakukan undang-undang tentang pendanaan pendidikan nasional. Dukungan tersebut dalam bentuk:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk keperluan pendidikan dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu atau mereka yang tidak mampu membiayai pendidikan.
- b. Dana BSM Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk siswa miskin. Tujuan pendanaan ini adalah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah. Selain itu, siswa miskin harus diberi kesempatan yang lebih baik untuk melanjutkan sekolah hingga mereka menyelesaikan pendidikannya. Bantuan keuangan yang diberikan BSM ini ditujukan untuk membantu siswa kurang mampu dan miskin saja. Sejalan dengan keberadaan manajemen sekolah berbasis komunitas (SBM), sekolah dapat mengeksplorasi dan mencari sumber pendanaan dalam komunitas individu dan organisasi, baik nasional maupun internasional, dalam semangat globalisasi.
- c. Sumber daya masyarakat dari berbagai sumber harus digunakan untuk kepentingan sekolah, terutama untuk kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Terkait hal tersebut, pencairan dana harus berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Pendidikan Sekolah (RAPBS)

siswa. Selain dana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kotamadya, sekolah juga menerima dana pendidikan dari orang tua siswa dalam bentuk apa yang disebut biaya rumah tangga dan kontribusi bulanan, yang dikenal sebagai SPP. Ada banyak jenis biaya berbeda yang dikeluarkan keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah.

- d. Berikut ini adalah daftar pengeluaran yang menjadi tanggung jawab orang tua siswa: Meskipun tidak semua elemen berlaku di setiap sekolah, data tersebut dapat memberikan gambaran umum tentang berapa banyak uang yang telah dikeluarkan oleh orang tua siswa, termasuk untuk barang-barang yang “tidak dapat lagi dipungut oleh sekolah” menurut peraturan.

Jenis-jenis biaya yang dikeluarkan orang tua untuk pendidikan siswa meliputi: 1) Biaya Awal 2) Biaya Kuliah Bulanan/SPP 3) Biaya Ujian Tengah Semester 4) Biaya Ujian Akhir Semester 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler 6) Biaya Kegiatan Praktik 57) Pembelian Buku Pelajaran/LKS 8) Pembelian Seragam 9) Biaya Kunjungan Lapangan/Pengembangan Rohani/Retret 10) Sumbangan Masyarakat (APP & AAP) 11) Biaya Lainnya.

Biaya Operasional Pendidikan adalah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut. BOP diberikan kepada sekolah agar mereka dapat mengelola diri sendiri sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Besaran BOP digunakan untuk pembiayaan dan mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan sumber daya manusia, serta biaya modal kerja tetap. BOP ini diberikan kepada sekolah mulai dari sekolah dasar (SD dan SMP) hingga sekolah menengah (SMA/SMK). Pemerintah daerah di tingkat negara bagian dan kabupaten/kota harus tetap menyediakan Dana Operasional (BOP) yang dianggarkan melalui APBD daerahnya setiap tahun sebagai sumber utama pendanaan sekolah.

6. Alokasi Biaya Pendidikan

Alokasi atau distribusi anggaran pendidikan adalah rencana untuk menentukan jumlah dan prioritas dana yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini, peran kepala madrasah/sekolah sangat krusial karena

keputusan anggaran diambil oleh kepala sekolah. Sebelum mengalokasikan anggaran untuk biaya sekolah, kepala sekolah harus menyiapkan rencana pengelolaan sumber daya sekolah. Rencana Pengelolaan Keuangan Sekolah disusun berdasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan program-program yang direkomendasikan dari hasil EDS. Program prioritas dikembangkan berdasarkan hasil EDS dan dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS). Dalam jangka menengah (4 tahun) ada dalam bentuk Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan jangka pendek (1 tahun) ada dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Analisis kegiatan dan sumber pendanaan, dikombinasikan dengan waktu pelaksanaannya, menghasilkan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS).²

Penetapan besaran biaya berdasarkan RKAS dilakukan dengan mengacu pada peraturan daerah masing-masing, peraturan daerah kabupaten/kota atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku atau berdasarkan harga pasar (tergantung pada jenis pengadaan barang dan jasa). RKAS harus mencantumkan semua sumber pendanaan, termasuk dana yang diterima lembaga dari pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, pemerintah daerah, dan sumber lainnya. (Rohmat, 2016) Untuk mengalokasikan dana pendidikan selalu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBM) Madrasah.³

Rencana anggaran ini dapat disusun secara berkala, tahunan, atau triwulan, oleh Kepala Madrasah, guru, siswa, bendahara, dan komite sekolah, tergantung pada tahap penyusunan anggaran. Alokasi anggaran ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi kebutuhan pendanaan. Perubahan harga material dan layanan, termasuk: Biaya material konstruksi, peralatan, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya yang dapat berfluktuasi sehingga menyebabkan anggaran awal tidak dapat mencukupinya.

Hal serupa terjadi dengan PPDB. Kebutuhan logistik, seperti penyediaan formulir, alat tulis, dan formulir pendaftaran, mungkin lebih tinggi dari yang diantisipasi, terutama

² Nengsi et al., "Pengelolaan Keuangan Sekolah : Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Dalam Satuan Pendidikan."

³ Jannah, "Pengelolaan Biaya Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

jika jumlah pelamar melebihi harapan. Biaya periklanan seperti pembuatan spanduk dan brosur mungkin lebih tinggi dari yang direncanakan. Saat melakukan evaluasi madrasah, biaya peralatan dan bahan evaluasi juga dapat bervariasi, seperti harga alat tulis, kertas, dan bahan evaluasi lainnya. Jika harga material setelah anggaran disiapkan, biaya sebenarnya mungkin lebih tinggi dari yang direncanakan semula.

7. Proses dan Tujuan Pembiayaan Pendidikan

Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun panduan teknis bagi sekolah tentang cara membuat rencana sekolah. Hal itu diumumkan oleh Prof. Slamet, PH. MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D. Yakni sebagai berikut:

- a. Pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).RPS penting untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada personel sekolah, meminimalkan risiko, mengurangi ketidakpastian di masa mendatang, serta mencapai perubahan dan tujuan sekolah yang lebih baik (perbaikan dan pengembangan).
- b. Pentingnya Perencanaan Sekolah.RPS adalah proses menentukan tindakan masa depan yang tepat dari suatu sekolah melalui serangkaian keputusan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen yang menguraikan kegiatan sekolah di masa mendatang untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang ditetapkan.

Tanggung jawab utama kepala sekolah kepada pemerintah, dewan sekolah, masyarakat, dan guru adalah melaporkan situasi keuangan sekolah. Pendapatan dan pengeluaran keuangan sekolah wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara berkala oleh manajemen sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Pelaporan anggaran dan pertanggungjawaban kepada orang tua siswa dan masyarakat akan terperinci dan transparan, sesuai dengan sumber pendanaan. Pelaporan dan akuntabilitas untuk anggaran yang dihasilkan dari inisiatif independen sekolah akan ditangani secara berbeda. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting bagi pemerintah dan penyandang dana lokal untuk mengetahui untuk apa saja dana yang

⁴ Sipahutar et al., "Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SMA Negeri 3 Tarutung."

diberikan kepada sekolah digunakan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dilaksanakan atau dijalankan sesuai rencana, apa saja hasil dari kegiatan yang didukung oleh dana tersebut dan bagaimana hal ini berdampak pada penyampaian misi inti sekolah hingga pembelajaran siswa.

Melalui kegiatan pengelolaan keuangan, kebutuhan keuangan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diperoleh dan dicatat secara transparan serta digunakan untuk mendanai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Beberapa tujuan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah: Untuk mencapai tujuan tersebut, kepala sekolah harus kreatif dalam menggali sumber dana, menunjuk bendahara yang ahli di bidang akuntansi dan tanggung jawab keuangan, serta menggunakan dana tersebut secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Manajemen keuangan melibatkan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengenai dana yang dialokasikan untuk operasional sekolah. Tujuan pengendalian ini adalah untuk menciptakan pengendalian keuangan yang tertib, sehingga pengendalian tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan upaya strategis dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Pembiayaan pendidikan mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal, yang semuanya sangat berperan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Dasar hukum pembiayaan pendidikan diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas, yang mewajibkan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.

Jenis pembiayaan terbagi atas biaya langsung dan tidak langsung, yang melibatkan berbagai komponen seperti gaji guru, bahan ajar, hingga biaya sosial. Prinsip utama dalam

pengelolaan keuangan pendidikan adalah efisiensi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang memastikan penggunaan dana secara bertanggung jawab dan terbuka.

Sumber pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, orang tua, serta pihak swasta. Dana seperti BOS, BSM, dan BOP menjadi instrumen penting dalam mendukung kebutuhan sekolah. Proses alokasi dana dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan keuangan seperti RKAS dan RAPBM, yang disusun secara sistematis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Perencanaan dan pelaporan keuangan yang baik menjadi dasar akuntabilitas dan keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Jannah, Syifa Nur. "Pengelolaan Biaya Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam" 1 (2024): 30–36.
- Masbullah. "Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendidikan." *Jurnal Agama Sosiasl Dan Budaya* 6, no. 1 (2023): 2599–2473.
- Nengsi, Sisri, Difa Maulidika, Ahmad Sabri, and Rully Hidayatullah. "Pengelolaan Keuangan Sekolah : Sumber Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Dalam Satuan Pendidikan," 2025.
- Sipahutar, Erpinna, Melfayenti Tanjung, Hotlinar Gultom, Lamtiurma Sormin, Elvis Tulus Sihite, and Pardomuan Simanullang. "Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di SMA Negeri 3 Tarutung." *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 3, no. 01 (2023): 52–58. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i01.2239>.
- Sudarmono, Sudarmono, Lias Hasibuan, and Kasful Anwar Us. "Pembiayaan Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 266–80. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>.
- .